



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jalan RTA. Milono No. 01 Telp & Fax (0536) 3228822 Palangka Raya

Palangka Raya, Mei 2024

K e p a d a

Yth. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah

di -
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400 /280/I.05/KESRA/2024


No.	Jenis Berkas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Data Manajemen Risiko (Risk Register) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya.

Plt. KEPALA BIRO

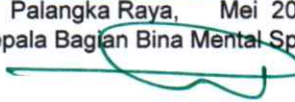


AHMAD PAHRUKA, S.Pd., M.MP
Pembina (IV/a)
NIP. 19730212 199909 1 001

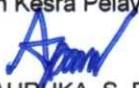
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah														
Tahun Penilaian	: 2024														
Periode yang dinilai	: 2024														
Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah														
OPD yang Dinilai	Biro Kesejahteraan Rakyat														
Sumber Data	Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat														
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah														
Sasaran Strategis (tebalkan sasaran yang dipilih)	1 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat 2 Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah														
IKU Renstra OPD (tebalkan yang dipilih)	<table><tr><th>IKU</th><th>Target 2026</th></tr><tr><td>1 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama</td><td>78,02</td></tr><tr><td>2 Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat</td><td>94,00%</td></tr><tr><td>3 Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat</td><td>9 Dokumen</td></tr><tr><td>1. Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</td><td>3 Dokumen</td></tr><tr><td>2. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</td><td>3 Dokumen</td></tr><tr><td>3. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</td><td>3 Dokumen</td></tr></table>	IKU	Target 2026	1 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	78,02	2 Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	94,00%	3 Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	9 Dokumen	1. Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3 Dokumen	2. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3 Dokumen	3. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3 Dokumen
IKU	Target 2026														
1 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	78,02														
2 Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	94,00%														
3 Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	9 Dokumen														
1. Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3 Dokumen														
2. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3 Dokumen														
3. Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3 Dokumen														
Informasi lain															
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Penilaian Resiko Strategi OPD Dilakukan Berdasarkan Atas Tujuan Strategis Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah dan Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat serta Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah Tujuan Strategis : Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah IKU Strategis : Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat														
	<div>Palangka Raya, 22 Mei 2024</div> <div>Pt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat,</div> <div></div> <div>AHMAD PAHRUKA, S.Pd, M.MP</div> <div>Pembina</div> <div>NIP. 197302121999091001</div>														

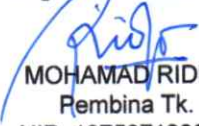
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah																																				
Tahun Penilaian	: 2024																																				
Periode yang dinilai	: 2024																																				
Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah																																				
OPD yang Dinilai	: Biro Kesejahteraan Rakyat																																				
Sumber Data	DPA Kalimantan Tengah TA. 2024																																				
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah																																				
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	1 Meningkatkan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat 2 Meningkatkan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah																																				
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kesejahteraan Rakyat serta Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual																																				
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	<table><tr><th></th><th>Sub Kegiatan</th><th>Indikator</th><th>Target tahun 2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>5 Dokumen</td></tr><tr><td>2</td><td>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td><td>Jumlah Dokumen Adm. Keuangan Perangkat Daerah</td><td>5 Dokumen</td></tr><tr><td>3</td><td>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</td><td>Jumlah Dokumen Adm. Barang Milik Daerah</td><td>2 Dokumen</td></tr><tr><td>4</td><td>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td><td>Jumlah Dokumen Adm. Kepegawaian</td><td>5 Dokumen</td></tr><tr><td>5</td><td>Administrasi Umum Perangkat Daerah</td><td>Tersedianya Adm. Umum</td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td>6</td><td>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td><td>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesra</td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td>7</td><td>Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual</td><td>Jumlah sarana Prasarana Spiritual Yang Dikelola</td><td>300 Unit</td></tr><tr><td>8</td><td>Fasilitas kelembagaan Bina Spiritual</td><td>Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual yang difasilitasi</td><td>200 Lembaga</td></tr></table>		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm. Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm. Barang Milik Daerah	2 Dokumen	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm. Kepegawaian	5 Dokumen	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adm. Umum	12 Bulan	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesra	12 Bulan	7	Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual	Jumlah sarana Prasarana Spiritual Yang Dikelola	300 Unit	8	Fasilitas kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual yang difasilitasi	200 Lembaga
	Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024																																		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen																																		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm. Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen																																		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm. Barang Milik Daerah	2 Dokumen																																		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adm. Kepegawaian	5 Dokumen																																		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Adm. Umum	12 Bulan																																		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesra	12 Bulan																																		
7	Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual	Jumlah sarana Prasarana Spiritual Yang Dikelola	300 Unit																																		
8	Fasilitas kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual yang difasilitasi	200 Lembaga																																		
Informasi Lain																																					
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual Indikator Jumlah Sarana Prasaran Spiritual Yang dikelola																																				
	<div>Palangka Raya, Mei 2024</div> <div>Kepala Bagian Bina Mental Spiritual,</div> <div></div> <div>EKA DYAN SATYA HADI, ST., M.Si</div> <div>Pembina Tk. I (IV/b)</div> <div>NIP. 196702231996031002</div>																																				


PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	2024			
Periode yang dinilai	2024			
Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah			
OPD yang Dinilai	: Biro Kesejahteraan Rakyat			
Sumber Data	DPA Kalimantan Tengah TA. 2024			
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	1 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat			
	2 Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Kesejahteraan Rakyat serta Fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024
	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen
	2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen
	3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitas Pengembangan kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
	Palangka Raya, Mei 2024 Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar,  AHMAD PAHRUKA, S. Pd, M. MP Pembina (IV/a) NIP. 197302121999091001			

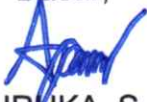
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah																		
Tahun Penilaian	: 2024																		
Periode yang dinilai	: 2024																		
Urusan Pemerintahan	: Sekretariat Daerah																		
OPD yang Dinilai	: Biro Kesejahteraan Rakyat																		
Sumber Data	DPA Kalimantan Tengah TA. 2024																		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah																		
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	1 Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat 2 Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Beribadah																		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Kesejahteraan Rakyat serta Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar																		
Sub Kegiatan (tebalkan)	<table><thead><tr><th></th><th>Sub Kegiatan</th><th>Indikator</th><th>Target tahun 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</td><td>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>2</td><td>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</td><td>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</td><td>2 Dokumen</td></tr><tr><td>3</td><td>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</td><td>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</td><td>1 Dokumen</td></tr></tbody></table>		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen		
	Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2024																
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Dokumen																
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen																
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen																
Informasi Lain																			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																		
	<div>Palangka Raya, Mei 2024</div> <div>Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar,</div> <div></div> <div>MOHAMAD RIDHO, S.Hut</div> <div>Pembina Tk. I (IV/b)</div> <div>NIP. 197507122005011014</div>																		

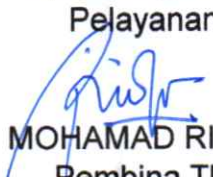
PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD OPD BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah	
Tahun Penilaian	2024	
Periode yang dinilai	2024	
Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
OPD yang Dinilai	Biro Kesejahteraan Rakyat	
Sumber Data	DPA Kalimantan Tengah TA. 2024	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah	
Program (Renja Tahun 2024) dan Kegiatan Utama	Program Kesejahteraan Rakyat serta Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Tercapainya target jumlah tempat sarana prasarana spiritual yang dikelola.	
Informasi Lain		
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Kesejahteraan Rakyat	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual	
	Indikator Jumlah Sarana Prasaran Spiritual Yang dikelola	
		<div>Palangka Raya, Mei 2024</div> <div>Kepala Bagian Bina Mental Spiritual,</div> <div></div> <div>EKA DYAN SATYA HADI, ST., M.Si</div> <div>Pembina Tk. I (IV/b)</div> <div>NIP. 196702231996031002</div>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD OPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah	
Tahun Penilaian	2024	
Periode yang dinilai	2024	
Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
OPD yang Dinilai	Biro Kesejahteraan Rakyat	
Sumber Data	DPA Kalimantan Tengah TA. 2024	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan	
Program (Renja Tahun 2024) dan Kegiatan Utama	Program Kesejahteraan Rakyat serta Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, 1. Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan.	
Informasi Lain		
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Kesejahteraan Rakyat	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan kesejahteraan Rakyat	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
	Indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
		Palangka Raya, Mei 2024 Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar,  AHMAD PAHRUKA, S. Pd, M. MP Pembina (IV/a) NIP. 197302121999091001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD OPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah	
Tahun Penilaian	2024	
Periode yang dinilai	2024	
Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
OPD yang Dinilai	Biro Kesejahteraan Rakyat	
Sumber Data	DPA Kalimantan Tengah TA. 2024	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah.	
Program (Renja Tahun 2024) dan Kegiatan Utama	Program Kesejahteraan Rakyat serta Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.	
Informasi Lain		
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Kesejahteraan Rakyat	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		Palangka Raya, Mei 2024 Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar,  MOHAMAD RIDHO, S.Hut Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 197507122005011014

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD	Biro Kesejahteraan Rakyat
Tahun Penilaian	2024
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Berbadah
Urutan Pemenintahan	Sekretariat Daerah
OPD yang Dinilai	Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			C/CUC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pernilik	Uraian	Sumber		C/CUC	Uraian	Pihak yang Terkena
				e							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tercapainya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Berbadah	Indeks Ketahanan Antar Umat Beragama	Informasi Hoax Yang Beredar di Lingkungan Masyarakat	RSO 24.00 :06.01	Kepala Dinas	Belum Meratanya Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual	Internal/ Eksternal	C	Saling Curiga di Masyarakat	Masyarakat	
2	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	Sulitnya Akses Pelayanan Kepada Masyarakat	RSO 24.00 :06.02	Kepala Dinas	SDM terbatas	Internal	C	Pelayanan terhambat	Masyarakat	
3	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Terjadinya Kelimpangan Pelayanan Kepada Masyarakat	RSO 24.00 :06.03	Kepala Dinas	SOP belum dilaksanakan dengan baik	Internal	UC	Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Masyarakat	



Identifikasi Risiko Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat bagian kesra dasar

[illegible]

Identifikasi Risiko Fraud OPD

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah									
Nama OPD	Biro Kesejahteraan Rakyat									
Tahun Penilaian	2024									
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021 -2026									
Tujuan Strategis	Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Berbadah									
Sasaran strategis OPD	1. Meningkatkan Pelayanan Penujangan Urusan Kesejahteraan Rakyat 2. Meningkatkan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Berbadah									
Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah									

RFO kodenya													
No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Gambaran Umum	Tahapan Proses	Risiko			Sebab*)			Dampak**)		
					Uraian	Skenario Fraud	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Pengelolaan Sarana Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana Prasarana Spiritual Yang Mendapatkan Bantuan Hibah	Pada Bagian Bina Mental Spiritual memiliki tupoksi dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan Hibah kepada badan/organisasi masyarakat yang secara ketentuan yang ditetapkan memenuhi	Tahapan Pelaksanaan	Data Penerima Bantuan Yang tidak tepat sasaran	Ketidaksesuaian jumlah RAB yang diajukan oleh calon penerima bantuan Hibah, dengan kondisi di lapangan, sehingga penentuan jumlah dana bantuan Hibah yang dikeluarkan oleh skpd tidak sesuai.	ROO.24.00.06.01	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual	Kurangnya pemahaman terhadap aturan Hibah	Internal	C	Terjadinya Kecemburuan Sosial	Masyarakat



Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis Pemda : Kalimantan Tengah Makin BERKAH

Tujuan Strategis OPD : Terwujudnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah

Tujuan Operasional OPD :

1. Data Jumlah Penerima Bantuan Keagamaan Yang Sesuai Dengan Sasaran

2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Tahapan Prosedur Penerimaan Bantuan Berobat

3. Meningkatnya Koordinasi Antar SKPD Terkait Bidang Kominfosantik

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD 1:				
	Informasi Hoax Yang Berderar di Lingkungan Masyarakat	RSO.24.00.06.01	4	2	8
	Sulitnya Akses Pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.24.00.06.02	2	2	4
	Terjadinya Ketimpangan Pelayanan Kepada Masyarakat	RSO.24.00.06.03	2	2	4
II	Risiko Operasional OPD 1: Bagian Bina Mental Spiritual				
	Data Penerima Bantuan Yang tidak tepat sasaran	ROO.24.00.06.01	3	2	6
	Risiko Operasional OPD 2: Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				
	Tidak diadakan nya sosialisasi mengenai persyaratan berkas dan tahapan penerimaan bantuan berobat pada masyarakat	ROO.24.00.06.02	1	3	3
	Risiko Operasional OPD 3: Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				
	Kegiatan Monev Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Tidak Berjalan	ROO.24.00.06.03	1	3	3
III	Risiko Fraud: Bagian Bina Mental Spiritual				
	Data Penerima Bantuan Tidak Mencapai Sasaran	RFO. 24.00.06.01	3	3	9
	Risiko Fraud: Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan				
	Kurangnya Informasi mengenai penerimaan bantuan berobat yang didapatkan oleh masyarakat	RFO. 24.00.06.02	3	2	6
	Risiko Fraud: Bagian Kesejahteraan Rakyat Non				
	Kegiatan Monev Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Tidak Berjalan	RFO. 24.00.06.03	3	1	3



Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Kalimantan Tengah Makin BERKAH
Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a		c	d	e	f	g
I	Risiko Strategi OPD 1					
	Informasi Hoax Yang Beredar di Lingkungan Masyarakat	RSO 24.00.06.01	8	Kepala Biro	Belum Meratanya Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual	Saling Curiga di Masyarakat
	Sulitnya Akses Pelayanan Kepada Masyarakat	RSO 24.00.06.02	9	Kepala Biro	SDM terbatas	Pelayanan terhambat
	Terjadinya Kelangkaan Pelayanan Kepada Masyarakat	RSO 24.00.06.03	6	Kepala Biro	SCP belum dilaksanakan dengan baik	Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah
II	Risiko Operasional OPD 1: nama					
	Data Penerima Bantuan Yang tidak tepat sasaran	ROO 24.00.06.01	9	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual	Kurangnya pemahaman terhadap aturan Hibah	Terjadinya Kecemburuan Sosial
	Risiko Operasional OPD 2:					
	Tidak diadakannya sosialisasi mengenai persyaratan berkas dan tahapan penerimaan bantuan	ROO 24.00.06.02	9	Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar	Tidak adanya Monev Kegiatan tersebut	Kurang lengkapnya informasi kepada masyarakat dalam penerimaan bantuan berobat dari Pemerintah Daerah
	Risiko Operasional OPD 3:					
	Kegiatan Monev Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Peningkatan Tidak Berjalan	ROO 24.00.06.03	9	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar	Kurangnya Kehadiran SKPD terkait dalam kegiatan Monev	Kebijakan Kesra berjalan tanpa ada kontrol
III	Risiko Fraud: Bagian Bina Mental Spiritual					
	Data Penerima Bantuan Tidak Mencapai Sasaran	ROO 24.00.06.03	9	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual	Kurangnya pemahaman terhadap aturan Hibah	Tidak meratanya pendistribusian bantuan.
	Risiko Fraud: Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					
	Kurangnya informasi mengenai penerimaan bantuan berobat yang didapatkan oleh masyarakat	RFO 24.00.06.01	6	Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar	Tidak adanya Monev Kegiatan tersebut	Anggaran Belanja Tidak Ter Realisasi dengan baik
	Risiko Fraud: Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					
	Kegiatan Monev Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Peningkatan Tidak Berjalan	RFO 24.00.06.03	3	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar	Kurangnya Kehadiran SKPD terkait dalam kegiatan Monev	Kesambungan antara SKPD antar kotakabupaten kurang optimal



Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah

Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah

No	Penyebab	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	e	f	g	h
I Risiko Strategis						
Informasi Hoax Yang Beredar di Lingkungan Masyarakat	Belum Meratanya Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spiritual	Melakukan Sosialisasi Hibah Sarpras	Belum Semua Informasi Hibah tersampaikan	Sosialisasi Hibah Sarpras melalui Media Elektronik	Kepala Biro	Nov-24
	Sulitnya Akses Pelayanan Kepada Masyarakat	SDM terbatas	Belum dapat tambahan	Memberikan Pelatihan Tambahan/Skill	Kepala Biro	Juli 2024
	Terjadinya Ketimpangan Pelayanan Kepada Masyarakat	SOP belum dilaksanakan dengan baik	Mudah Lupa	Memasang Poster SOP	Kepala Biro	Juli 2024
	II Risiko Operasional OPD 1: Bagian Bina Mental Spiritual					
Data Penerima Bantuan Yang tidak tepat sasaran	Kurangnya pemahaman terhadap aturan Hibah	Mem bentuk Tim Verifikasi	Belum dilakukan verifikasi secara IT	Menggunakan aplikasi dalam proses Verifikasi	Kepala Bagian Bina Mental Spiritual	Oktober 2024
III Risiko Operasional OPD 2: Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						
Tidak diadakan nya sosialisasi mengenai persyaratan berkas dan tahapan penerimaan bantuan berobat pada masyarakat	Tidak adanya Monev kegiatan tersebut	Mengadakan Rapat Monev	Belum semua Stakeholder bisa hadir	Intensifkan koordinasi antar stakeholder melalui pimpinan	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Juli 2024
IV Risiko Operasional OPD 3: Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						
Kegiatan Monev Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Tidak Berjalan	Kurangnya Kehadiran SKPD terkait dalam kegiatan Monev	Menyampaikan Undangan secara tertulis	Masih dianggap undangan biasa	Perlu diberikan penguatan pentingnya undangan melalui pimpinan masing-masing SKPD	Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Non Pelayanan dasar	Juli 2024

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

Pelangka Raya, Mei 2024

Plt. Kepala Biro Kesra

AHMAD PAHPUKA, S. Pd. M. MP

Pembina (IV/a)

NIP. 197302121999091001

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Provinsi Kalimantan Tengah
: 2024
: Terwujudnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Kualitas Beribadah
: Sekretaris Daerah

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan form 7 kolom f	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Sosialisasi Hibah Sarpras melalui Media Elektronik	Monitoring Langsung	Biro Kesra	6 Bulan	Nov-24	Belum Dilaksanakan
	Memberikan Pelatihan Tambahan/Skill	Monitoring Langsung	Biro Kesra	6 Bulan	Juli 2024	Belum Dilaksanakan
	Memasang Poster SOP	Monitoring Langsung	Biro Kesra	6 Bulan	Juli 2024	Belum Dilaksanakan
4	Menggunakan aplikasi dalam proses Verifikasi	Monitoring Langsung	Biro Kesra	6 Bulan	Oktober 2024	Belum Dilaksanakan
5	Intensifikan koordinasi antar stakeholder melalui pimpinan	Rapat	Biro Kesra	3 Bulan	Juli 2024	Belum Dilaksanakan
6	Perlu diberikan penguatan pentingnya undangan melalui pimpinan masing-masing SKPD	Rapat	Biro Kesra	3 Bulan	Juli 2024	Belum Dilaksanakan

ALMAD RAHBUK, S.Pd, M. MP
Sekretaris Daerah (Wd)
M.P. 197802124399091001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
Kantor Sekretaris Daerah
Jl. Sekeloa, Biro Kesra
P. O. Box 1001
75000 Banjarmasin
Telp. (0511) 4333333
Fax. (0511) 4333333
Email: sekretaris@prov.kaltan.go.id